



Pelatihan Pembukuan Transaksi Keuangan Bagi Aparatur Desa

Samirah Dunakhir¹, Nur Afiah²

¹Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar

²Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar

Abstrak. Program Kemitraan Komunitas (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pelatihan sekaligus pendampingan bagi aparat desa dalam melakukan pembukuan transaksi-transaksi keuangan. Mitra kegiatan ini adalah para aparat dan pegawai Pemerintah Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara. Permasalahan mitra adalah: (1) terbatasnya ilmu pengetahuan dalam melakukan pembukuan transaksi-transaksi keuangan, (2) adanya keharusan bagi Pemerintah Desa untuk melakukan administrasi keuangan dan menyampaikan laporan, dan (3) terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Desa. Sasaran dari kegiatan ini adalah aparat desa dan pegawai Pemerintah Desa yang mampu melakukan pembukuan dan pencatatan transaksi-transaksi keuangan. Metode yang digunakan adalah: ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan pendampingan mitra. Hasil yang dicapai adalah (1) mitra memiliki pengetahuan dalam melakukan pembukuan dan pencatatan transaksi-transaksi keuangan Pemerintah Desa, dan (2) mitra memiliki keterampilan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Desa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Kata kunci: manajemen keuangan, pembukuan, pemerintah desa

Abstract. This Community Partnership Program (PKM) aims to provide training as well as assistance for village officials in accounting for financial transactions. The partners of this activity are officials and employees of the Munte Village Government, Tanalili District, North Luwu Regency. Partner problems are: (1) limited knowledge in bookkeeping financial transactions, (2) there is an obligation for the Village Government to carry out financial administration and submit reports, and (3) limited human resources owned by the Village Government. The targets of this activity are village officials and Village Government employees who are able to book and record financial transactions. The methods used are: lectures, demonstrations, discussions, questions and answers, and partner assistance. The results achieved are (1) partners have knowledge in bookkeeping and recording of Village Government financial transactions, and (2) partners have the skills to compile Village Government financial reports in accordance with applicable Government Accounting Standards.

Keywords: bookkeeping, financial management, village government.

I. PENDAHULUAN

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai

oleh APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan

akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. APBDesa yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. APBDesa dapat menjawab partisipasi warga yang bersifat mikro dan mampu ditangani pada level desa.

Proses penguatan Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya tahap penyusunan, penatalaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa, agar APBDesa yang disusun berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabilitas.

Berdasar pemikiran-pemikiran itulah maka kegiatan pengabdian ini dibuat sebagai sumbangsih kami dalam mewujudkan *Good Village Governance* (Kepemerintahan Desa yang Baik).



Gambar 1. Spanduk Program

II. METODE YANG DIGUNAKAN

a. Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang dapat menjamin bahwa peserta dapat mengimplementasi pengetahuannya setelah mengikuti pelatihan. Adapun metode yang digunakan antara lain:

1. Metode Ceramah Interaktif; metode ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemahaman manajemen keuangan peserta yang mengikuti pelatihan.
2. Metode Kasus; metode ini memberikan beberapa gambaran kasus yang berkaitan

dengan manajemen keuangan organisasi, dan bagaimana penyelesaiannya.

3. Metode Aplikatif; metode ini memberikan aplikasi-aplikasi penyusunan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi.
- b. Pendampingan

Secara teoretis, kategori penerapan suatu ilmu pengetahuan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: (i) tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki kemauan; (ii) tidak memiliki pengetahuan namun memiliki kemauan; (iii) memiliki pengetahuan namun tidak memiliki kemauan; dan (iv) memiliki pengetahuan dan memiliki kemauan.

Setelah pelaksanaan pelatihan, diasumsikan bahwa para peserta hanya memenuhi kategori (iii) dan (iv). Berikut gaya (metode) pendampingan yang akan sesuai untuk diterapkan pada tahap ini;

1. Partisipatif; metode ini untuk mendampingi mereka yang sudah memiliki pengetahuan/kemampuan, namun belum memiliki kemauan untuk menerapkan ilmunya. Metode ini mengharuskan peserta untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan sembari diyakinkan mengenai urgensi hal tersebut untuk dilakukan. Sehingga, peserta akan termotivasi dan menikmati pekerjaannya.
2. Delegatif; metode ini tepat bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan dan memiliki keinginan untuk menerapkannya. Melalui metode ini, peserta akan disertai penuh tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan kapan tepatnya dilaksanakan.



Gambar 2. Penyampaian Materi Kegiatan



III. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

a. Realisasi Penyelesaian Masalah

Pelatihan dapat dilaksanakan berhasil terlaksana dengan baik berkat kerjasama antara Tim Pelaksana Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar dengan mitra. Partisipasi mitra dalam hal ini diantaranya mendaftar dan mengkoordinir peserta yang ikut serta pelatihan, membantu fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pelatihan.

Dalam kegiatan pelatihan ini menggunakan alat dan bahan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini. Adapun alat yang digunakan berupa papan tulis, spindol, materi yang dibagikan kepada peserta, serta fasilitas ruangan yang digunakan untuk kegiatan pelatihan, sound system, LCD Proyektor, perangkat-perangkat lainnya yang dibutuhkan dalam proses pelatihan berlangsung. Bahan yang digunakan kertas HVS untuk dipakai catatan sementara sebelum dipindahkan ke note book yang diberikan kepada peserta pelatihan, kertas Kwarto untuk laporan penelitian, alat tulis menulis, serta tinta printer untuk penggandaan laporan.

Selain itu, karena pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi wabah virus COVID-19, maka para peserta dibagikan pula masker dan *handsanitizer*. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan, sehingga bisa mencegah penularan virus korona baik antar peserta maupun dengan para narasumber dan panitia.

b. Kegiatan dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi: Metode pelatihan, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas dan latihan penatabukuan keuangan sederhana. Cara mengukur dan mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan pelaksanaan pelatihan ini, maka perlu dilakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dan sekaligus

untuk dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni: Tahap pertama: Pre-Test/Observasi, dilakukan pada tahap awal (sebelum peserta pelatihan diberikan materi pelatihan yang terdiri dari Definisi, ruang lingkup dan tujuan Pengelolaan Keuangan; Gambaran Umum Proses Pengelolaan. Evaluasi yang dilakukan pada tahap awal kegiatan dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data mengenai kemampuan dasar yang dimiliki peserta tentang pengelolaan.

Tahap kedua, evaluasi dilakukan pada saat proses pelaksanaan kegiatan berlangsung dimana dilakukan simulasi dan Assessment, meliputi kegiatan pemilihan satu topik khusus, dilanjutkan Pendefinisian Pengelolaan Keuangan. Evaluasi yang dilakukan bersamaan pada saat proses kegiatan pelatihan berlangsung, yakni dengan cara melakukan pengamatan langsung. Tujuannya untuk mengetahui tingkat keaktifan dan partisipasi aktif peserta, kedisiplinan, antusias dan motivasi peserta.

Tahap ketiga: Post-Test, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan (setelah peserta pelatihan memperoleh materi), dengan membagi beberapa kelompok kecil berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing tempat Kerja para peserta, kemudian diberikan tugas menyelesaikan tugas secara mandiri sampai menghasilkan laporan masing-masing. Kegiatan dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana perubahan tingkat pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan ini.

Adapun indikator yang dijadikan tolok-ukur penilaian/evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan in: (1) kemampuan peserta memahami materi yang diberikan, (2) Kemampuan peserta pelatihan di dalam mengelola data serta menganalisa sehingga menjadi informasi yang berguna, dan (3) kedisiplinan, partisipasi, antusias, dan motivasi peserta selama mengikuti pelatihan.



SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

"Peluang dan tantangan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di era kebiasaan baru"

ISBN: 978-623-7496-57-1



Gambar 3. Peserta/Mitra Kegiatan

Keuangan Desa.

Syachbrani, W. (2012). Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Syachbrani, W., & Yahya, M. (2018). Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa. *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 1(2), 45-55.

IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan evaluasi kegiatan, maka hasil pelaksanaan kemitraan masyarakat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mitra memiliki pengetahuan dalam melakukan pembukuan dan pencatatan transaksi-transaksi keuangan Pemerintah Desa, dan
- b. Mitra memiliki keterampilan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Desa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku..

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor UNM atas arahan dan pembinaanya selama proses kegiatan Pengabdian Masyarakat berlangsung. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNM dan Pemerintah Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah memberi fasilitas, melakukan monitoring, dan mengevaluasi kegiatan PKM hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan